



## DINAMIKA KOMUNIKASI PENGUNGKAPAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA PERKOTAAN

Novrian<sup>1\*</sup>, Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2</sup>, Pudji Muljono<sup>3</sup>, dan Krishnarini Matindas<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB  
University, Bogor, Indonesia

\*novriannovrian@apps.ipb.ac.id

### Abstract

*Child sexual abuse remains a serious social issue in Indonesia, yet its communicative dimension is still rarely discussed in communication studies. This study examines how child survivors negotiate disclosure processes within urban family contexts using Communication Privacy Management Theory. A qualitative case study approach was employed involving survivors, family members, psychologists, social workers, and institutional actors in Bekasi City, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, observations, focus group discussions, and document analysis. The findings reveal that disclosure occurs gradually through selective communication, trust testing, and partial openness shaped by emotional safety and family relationships. Decisions to disclose or conceal information are strongly influenced by power relations, economic dependency, cultural stigma, and fear of social judgment. The study also identifies information boundary turbulence within family and institutional responses, including information leakage, repeated storytelling, and weakened survivor trust. These findings highlight that child protection requires trauma-informed communication, confidentiality management, and stronger interinstitutional coordination to create safer communication environments for child survivors in urban protection systems.*

**Keywords:** *child protection; child sexual abuse; communication privacy management; disclosure communication; urban family*

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, tetapi dimensi komunikasinya masih relatif terbatas dibahas dalam kajian komunikasi. Penelitian ini menganalisis bagaimana anak penyintas menegosiasikan proses pengungkapan dalam lingkungan keluarga perkotaan menggunakan Teori Manajemen Privasi Komunikasi. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan melibatkan penyintas, keluarga, psikolog, pendamping sosial, dan aktor institusional di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan berlangsung secara bertahap melalui komunikasi selektif, pengujian kepercayaan, dan keterbukaan parsial yang dipengaruhi rasa aman emosional serta relasi keluarga. Keputusan korban untuk membuka atau menyembunyikan informasi dipengaruhi relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, stigma budaya, dan ketakutan terhadap penghakiman sosial. Penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan batas informasi dalam respons keluarga dan institusi perlindungan berupa kebocoran informasi, pengulangan cerita, serta menurunnya kepercayaan penyintas. Temuan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi sensitif trauma, pengelolaan kerahasiaan informasi, dan penguatan koordinasi antarlembaga dalam sistem perlindungan anak perkotaan.

**Kata kunci:** keluarga perkotaan; kekerasan seksual anak; komunikasi pengungkapan; perlindungan anak; teori manajemen privasi komunikasi

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembahasan mengenai kekerasan seksual anak selama ini lebih banyak ditempatkan dalam perspektif hukum, psikologi, dan kesehatan, sedangkan dimensi komunikasinya masih relatif terbatas dibahas dalam kajian akademik. Pengalaman kekerasan yang dialami anak sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan trauma individu, tetapi juga berhubungan dengan cara korban membangun, menyembunyikan, atau mengungkapkan pengalaman tersebut dalam relasi sosial di sekitarnya. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dan sebagian besar terjadi dalam lingkungan domestik maupun relasi yang dekat dengan korban (Komnas Perempuan, 2021). Permasalahan rendahnya pelaporan juga masih menjadi tantangan global karena banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak pernah masuk ke dalam sistem pelaporan formal maupun pendataan nasional (Mathews et al., 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual anak tidak hanya menjadi persoalan kriminal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika komunikasi dan relasi kuasa dalam keluarga.

Berbagai regulasi mengenai perlindungan anak telah diperkuat melalui kebijakan nasional maupun ratifikasi konvensi internasional. Tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan ruang aman bagi anak untuk berbicara mengenai peristiwa yang dialaminya. Kedekatan emosional antara korban dan pelaku, ketergantungan ekonomi dalam keluarga, serta budaya menjaga nama baik keluarga sering kali membentuk situasi komunikasi yang membatasi keberanian anak untuk mengungkapkan pengalaman traumatis. Diam dalam situasi tersebut tidak selalu menunjukkan penerimaan, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan diri di tengah tekanan sosial dan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Kerentanan anak terhadap kekerasan seksual berkaitan dengan ketidakstabilan keluarga, tekanan ekonomi, serta lemahnya komunikasi antara anak dan orang tua (Humaira et al., 2015; Koerner & Fitzpatrick, 2006). Kasus inses menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit diungkap karena melibatkan relasi kedekatan emosional dan stigma sosial terhadap keluarga korban (Komnas Perempuan, 2021). Pola komunikasi keluarga yang tertutup turut memperbesar ketakutan anak terhadap penolakan, ketidakpercayaan, maupun tuduhan dari lingkungan terdekatnya (Erickson et al., 1989).

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengungkapan kekerasan seksual anak tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui proses komunikasi yang dinegosiasikan secara bertahap dalam relasi sosial yang kompleks. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlambatan pengungkapan pada kasus kekerasan seksual anak umumnya dipengaruhi rasa takut, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap respons lingkungan sekitar (Alaggia et al., 2019).

Penelitian mengenai pengungkapan kekerasan seksual anak selama ini masih didominasi oleh pendekatan psikologi forensik, trauma, dan advokasi hukum. Sejumlah penelitian menyoroti trauma emosional, riwayat kekerasan dalam keluarga, serta kerentanan sosial-ekonomi sebagai faktor yang memengaruhi keberanian korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya (Anthony et al., 2014; DiLillo et al., 2000; Rudolph et al., 2018). Pembahasan mengenai bagaimana korban mengelola informasi pribadi, mempertimbangkan risiko sosial, serta menegosiasikan keterbukaan informasi dalam lingkungan keluarga masih relatif terbatas. Padahal, proses komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan apakah pengalaman kekerasan dapat diungkapkan, diterima, atau justru kembali disembunyikan.

Teori Manajemen Privasi Komunikasi menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengatur informasi pribadi melalui proses negosiasi batas privasi dan pengelolaan keterbukaan informasi (Petronio & Child, 2020). Informasi pribadi tidak sepenuhnya dibuka atau ditutup secara tetap, tetapi terus dinegosiasikan berdasarkan tingkat kepercayaan, kedekatan relasi, dan konsekuensi sosial yang diperkirakan akan muncul (Hernandez & Petronio, 2019). Sebagian besar penelitian mengenai teori tersebut masih berfokus pada masyarakat Barat dan kelompok dewasa. Penerapan Teori Manajemen Privasi Komunikasi pada pengalaman anak korban kekerasan seksual dalam sistem keluarga yang hierarkis, khususnya di wilayah perkotaan Indonesia, masih sangat terbatas. Nilai kepatuhan kepada orang tua dan upaya menjaga kehormatan keluarga dapat membentuk dinamika komunikasi yang berbeda dalam proses keterbukaan informasi korban.

Konteks perkotaan di Indonesia menjadi ruang sosial yang penting untuk memahami dinamika tersebut. Urbanisasi yang cepat, kesenjangan sosial-ekonomi, dan tingginya kepadatan relasi sosial menciptakan tantangan tersendiri dalam perlindungan anak. Wilayah perkotaan memiliki akses lebih besar terhadap layanan perlindungan dan mekanisme pelaporan formal. Tekanan sosial,

stigma, dan kekhawatiran terhadap citra keluarga tetap memengaruhi keputusan korban untuk berbicara mengenai pengalaman traumatis yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas lingkungan sosial dan sistem perlindungan dalam menyediakan keamanan komunikasi bagi korban. Stigma terhadap korban kekerasan seksual juga terus direproduksi melalui ruang digital dan media sosial yang berpotensi memperbesar ketakutan korban terhadap penghakiman publik (Purnama et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika komunikasi pengungkapan kekerasan seksual anak dalam lingkungan keluarga perkotaan. Pengungkapan pengalaman kekerasan dipahami bukan sebagai proses yang berlangsung secara linear, melainkan sebagai proses negosiasi komunikasi yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, kedekatan emosional, risiko sosial, dan mediasi institusional. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana anak penyintas kekerasan seksual menegosiasikan proses pengungkapan pengalaman kekerasan dalam lingkungan keluarga; 2) faktor relasional, budaya, dan struktural apa yang memengaruhi keputusan korban untuk

membuka atau menyembunyikan informasi; dan 3) bagaimana dinamika komunikasi serta ketegangan batas informasi muncul dalam respons keluarga maupun institusi perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi dan pembangunan sosial dalam beberapa aspek. Penelitian ini memperluas penerapan Teori Manajemen Privasi Komunikasi pada konteks relasi kuasa antara anak dan keluarga yang masih terbatas dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif empiris dari konteks perkotaan Indonesia yang dapat memperkaya kajian komunikasi dari negara berkembang mengenai perlindungan anak dan kerentanan sosial. Penelitian ini turut menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam pembangunan sistem perlindungan anak, terutama dalam menciptakan ruang komunikasi yang aman, suportif, dan responsif terhadap pengalaman korban. Penguatan perlindungan anak pada akhirnya tidak hanya memerlukan regulasi formal, tetapi juga transformasi komunikasi dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

## **METODOLOGI**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus untuk memahami dinamika komunikasi pengungkapan kekerasan seksual anak dalam lingkungan keluarga perkotaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif korban, proses negosiasi komunikasi, serta relasi sosial yang membentuk keberanian maupun hambatan korban dalam mengungkapkan pengalaman tersebut. Paradigma konstruktivis digunakan untuk memahami bahwa pengungkapan pengalaman kekerasan tidak berdiri sebagai peristiwa psikologis yang terpisah, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, relasi kuasa, dan pengalaman komunikasi dalam keluarga maupun institusi perlindungan anak (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah perkotaan penyangga Jakarta yang mengalami perkembangan urbanisasi, kepadatan penduduk, dan peningkatan persoalan perlindungan anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya kompleksitas sosial perkotaan yang memengaruhi pola komunikasi keluarga dan mekanisme perlindungan anak. Kasus-kasus penelitian diperoleh melalui data penanganan yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam rentang tahun 2020–2024. Seluruh kasus yang dipilih telah menyelesaikan proses hukum sehingga memungkinkan penelitian dilakukan dengan

mempertimbangkan stabilitas kondisi psikologis partisipan dan mengurangi potensi tekanan emosional selama proses wawancara.

### **Pengumpulan Data**

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan partisipan dalam proses pengungkapan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Penelitian melibatkan 20 partisipan yang terdiri atas penyintas, anggota keluarga, pendamping, dan aktor institusional untuk memperoleh sudut pandang yang beragam mengenai dinamika komunikasi pengungkapan kasus. Kriteria informan utama mencakup anak atau penyintas yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak atau remaja serta bersedia mengikuti wawancara mendalam. Informan pendukung dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam layanan psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan anak.

Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan menandatangani persetujuan wawancara sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Persetujuan orang tua atau wali juga diperoleh bagi partisipan yang berusia di bawah delapan belas tahun, disertai persetujuan sukarela dari anak sebagai bagian dari prinsip etika penelitian yang melibatkan

anak (Coyne, 2010). Analisis mendalam dalam penelitian ini difokuskan pada lima informan utama penyintas yang memiliki pengalaman pengungkapan berbeda sehingga memungkinkan eksplorasi mengenai negosiasi komunikasi dalam berbagai konteks relasi keluarga dan sosial. Karakteristik informan utama disajikan pada Tabel 1.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen pendukung. Wawancara dilakukan secara bertahap untuk membangun kenyamanan dan keamanan komunikasi bagi partisipan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim dan dilengkapi dengan catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung. Penggunaan berbagai sumber data memungkinkan dilakukannya triangulasi untuk memperkuat kedalaman analisis dan validitas interpretasi penelitian.

### **Analisis Data**

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik induktif untuk memahami dinamika komunikasi pengungkapan kekerasan seksual anak dalam lingkungan keluarga dan institusi perlindungan. Proses analisis diawali dengan membaca transkrip wawancara secara berulang guna mengidentifikasi pola komunikasi yang

berkaitan dengan pengungkapan peristiwa yang dialami, relasi kuasa dalam keluarga, negosiasi batas informasi, stigma sosial, dan respons institusional terhadap korban. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keutuhan informasi dan konteks pengalaman partisipan.

Tahap analisis dilakukan melalui proses pengodean terbuka untuk menemukan kategori-kategori awal yang muncul dari data lapangan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengodean aksial untuk melihat hubungan antarkategori dan menemukan keterkaitan antar tema yang berkaitan dengan pengalaman pengungkapan korban. Analisis tidak hanya difokuskan pada pengalaman individu penyintas, tetapi juga mempertimbangkan perspektif keluarga dan aktor institusional guna memahami bagaimana komunikasi dibentuk, dibatasi, maupun dinegosiasikan dalam proses perlindungan anak.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui pengodean selektif untuk merumuskan tema-tema utama yang relevan dengan Teori Manajemen Privasi Komunikasi. Perbandingan silang antar sumber data digunakan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pengalaman komunikasi pada setiap kasus. Proses tersebut memungkinkan penelitian memahami bagaimana korban

mengelola informasi pribadi, mempertimbangkan risiko sosial, serta menegosiasikan keberanian untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan dalam relasi keluarga dan sistem perlindungan anak di wilayah perkotaan.

**Pertimbangan Etis Penelitian**

Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan

Nomor 988/KE.01/SK/12/2024. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan tertulis sebelum wawancara dilakukan. Persetujuan orang tua atau wali juga diperoleh bagi partisipan berusia di bawah delapan belas tahun sesuai standar etika penelitian pada anak (Coyne, 2010). Identitas partisipan disamarkan menggunakan nama samaran dan proses wawancara dilakukan secara empatik serta sensitif terhadap pengalaman trauma.

*Tabel 1. Karakteristik Informan Utama*

Inisial	Usia Saat Ini	Status Pendidikan	Usia Saat Kejadian	Relasi dengan Pelaku
IS	18 tahun	Siswa sekolah menengah kejuruan	Sekolah menengah pertama	Pegawai sekolah
DW	15 tahun	Tidak bersekolah	Remaja awal	Ayah tiri
RI	21 tahun	Mahasiswa	Sekolah menengah atas	Kenalan ayah
NU	15 tahun	Siswa sekolah menengah pertama	Sekolah dasar	Ayah kandung
NY	21 tahun	Mahasiswa cuti	16 tahun	Pacar

Sumber: Penulis (2026)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengungkapan dalam Relasi Keluarga**

Proses pengungkapan kekerasan seksual pada anak tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui tahapan komunikasi yang bertahap dan penuh pertimbangan. Sebagian besar penyintas memilih menyimpan peristiwa yang dialami dalam waktu yang cukup lama karena merasa takut terhadap respons keluarga maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Diam dalam konteks tersebut tidak selalu menunjukkan penerimaan terhadap kekerasan, tetapi

menjadi strategi perlindungan diri untuk menghindari tekanan sosial, konflik keluarga, atau kemungkinan disalahkan oleh orang lain.

*“Kalau teman-teman tahu, pasti semua orang di sekolah juga bakal tahu. Saya takut dijauhi, dijahili, atau dibilang-bilang. Jadi lebih baik tidak usah cerita ke siapa pun kecuali ibu saja.” (IS, 18 tahun)*

Pengungkapan pengalaman tersebut juga dipengaruhi oleh munculnya peristiwa tertentu yang mendorong terbukanya informasi. Pada beberapa kasus,

pengungkapan terjadi setelah adanya tekanan emosional yang semakin berat atau ketika rahasia mulai sulit dipertahankan. Kasus IS menunjukkan bahwa viralnya kasus serupa di lingkungan sekolah mendorong keberanian untuk berbicara, sedangkan pada kasus DW pengungkapan bermula ketika ibu korban menemukan bukti kekerasan di telepon genggam pelaku.

*“Hati saya seperti menyuruh membuka telepon itu. Baru beberapa menit dibuka, langsung terlihat semua buktinya... ada video dia melakukan itu kepada anak saya.”  
(Ibu DW)*

Penyintas umumnya tidak langsung mengungkapkan seluruh pengalaman tersebut secara terbuka. Penyampaian cerita dilakukan secara parsial sambil mengamati apakah lingkungan terdekat dapat memberikan respons yang aman dan tidak menghakimi. Bentuk komunikasi awal yang muncul biasanya berupa penolakan pergi ke sekolah, menangis, atau memberikan penjelasan yang belum lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Fenomena tersebut menegaskan bahwa pengungkapan berlangsung melalui negosiasi kepercayaan yang bertahap.

*“Awalnya saya cuma bilang tidak mau sekolah lagi... lama-lama baru saya cerita sedikit demi sedikit.” (DW, 15 tahun)*

Relasi emosional dalam keluarga turut menentukan kepada siapa penyintas memilih membuka peristiwa yang dialami. Ibu menjadi figur yang paling sering dipersepsikan sebagai ruang aman karena dianggap lebih mampu memberikan dukungan emosional dibanding anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, ayah atau keluarga besar sering dipandang berpotensi memberikan respons marah, menyalahkan korban, atau memperbesar konflik dalam keluarga.

*“Saya hanya cerita ke ibu karena ibu orangnya lembut dan pengertian. Kalau cerita ke ayah, takut dia akan marah-marah dan menyalahkan saya.” (NU, 15 tahun)*

Dimensi waktu dan kesiapan emosional juga berperan penting dalam proses pengungkapan. Sebagian penyintas baru berani berbicara setelah memperoleh pendampingan psikologis atau dukungan dari lembaga sosial yang dianggap mampu menjaga kerahasiaan informasi. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keberanian untuk mengungkapkan kekerasan tidak muncul secara spontan, tetapi berkembang melalui proses pemulihan emosional dan terbentuknya rasa aman dalam komunikasi.

*“Dulu saya tidak berani cerita ke siapa pun. Tapi setelah rutin konseling dan dibantu pendamping, saya mulai merasa lebih kuat untuk bicara.” (RI, 21 tahun)*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual anak berlangsung melalui proses komunikasi yang bertahap dan selektif. Penyintas tidak langsung membuka seluruh pengalaman yang dialami, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan rasa aman, tingkat kepercayaan, serta kemungkinan respons dari lingkungan terdekatnya. Proses pengungkapan juga dipengaruhi oleh kondisi emosional korban, kedekatan relasi interpersonal, dan keberadaan figur yang dianggap mampu memberikan perlindungan maupun dukungan psikologis.

#### **Relasi Kuasa dan Kerahasiaan Informasi**

Keputusan penyintas untuk membuka atau menyembunyikan peristiwa yang dialami sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam keluarga. Ketergantungan emosional dan ekonomi terhadap pelaku membuat sebagian korban memilih mempertahankan kerahasiaan informasi demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku tetap dipandang sebagai figur yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pengungkapan dianggap dapat memunculkan risiko baru bagi korban maupun keluarganya.

Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling kuat membentuk keputusan korban untuk diam. Penyintas yang

berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung merasa takut apabila pengungkapan menyebabkan pelaku meninggalkan keluarga atau berhenti memberikan nafkah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan untuk berbicara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban, tetapi juga oleh pertimbangan mengenai keberlangsungan hidup keluarga.

*“Ayah tiri memang yang berbuat seperti itu, tapi dia juga yang biaya untuk kami dan bantu kami bayar sekolah. Kalau saya cerita dia yang menyakiti saya, takut dia pergi dan keluarga saya tidak ada uang untuk makan.” (DW, 15 tahun)*

Norma budaya mengenai kehormatan keluarga dan konsep aib turut memengaruhi cara penyintas mengelola informasi pribadi. Pengalaman kekerasan seksual sering dipandang sebagai persoalan yang dapat mencoreng reputasi keluarga sehingga korban merasa perlu menjaga kerahasiaan pengalaman tersebut. Kondisi tersebut menciptakan tekanan sosial yang membuat korban lebih memilih diam dibanding menghadapi kemungkinan penolakan atau pengucilan dari lingkungan sekitar.

*“Kalau ini diketahui tetangga, mereka akan bilang keluarga saya aib. Terutama karena yang berbuat itu*

*termasuk keluarga sendiri. Saya tahu itu salah, tapi kalau saya melapor, keluarga saya akan dijauhi orang.” (NU, 15 tahun)*

Ketakutan terhadap stigma sosial juga muncul dalam lingkungan sekolah dan pergaulan sebaya. Penyintas merasa khawatir peristiwa yang dialami akan menyebar secara tidak terkendali dan memengaruhi cara orang lain memandang dirinya. Kekhawatiran tersebut membuat korban membatasi informasi hanya kepada orang-orang tertentu yang dianggap dapat dipercaya dan mampu menjaga kerahasiaan.

*“Kalau teman-teman tahu, pasti semua orang di sekolah juga bakal tahu. Saya takut dijauhi, dijahili, atau dibilang-bilang.” (IS, 18 tahun)*

Faktor keamanan emosional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepada siapa korban akan membuka cerita mengenai peristiwa yang dialaminya. Ibu cenderung dipersepsikan sebagai figur yang lebih mampu memberikan dukungan emosional, sedangkan ayah sering dipandang berpotensi memberikan respons marah atau menyalahkan korban. Perbedaan persepsi tersebut membentuk pola keterbukaan informasi yang selektif dalam lingkungan keluarga.

*“Saya hanya cerita ke ibu karena ibu orangnya lembut dan pengertian. Kalau cerita ke ayah, takut dia akan*

*marah-marah dan menyalahkan saya.” (NU, 15 tahun)*

Keberadaan pendamping profesional dan lembaga sosial juga berperan penting dalam membuka ruang komunikasi bagi penyintas. Pendamping yang mampu memberikan rasa aman, menjaga kerahasiaan informasi, dan membangun hubungan yang suportif membuat korban lebih berani mengungkapkan peristiwa yang sebelumnya disembunyikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan korban untuk berbicara sangat dipengaruhi oleh hadir atau tidaknya lingkungan komunikasi yang aman dan tidak menghakimi.

*“Awalnya saya tidak percaya sama siapa pun. Tapi waktu ada kakak dari LSM datang ke sekolah dan bilang cerita saya akan dirahasiakan, saya mulai berani bicara.” (IS, 18 tahun)*

Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi pada penyintas kekerasan seksual anak tidak ditentukan semata oleh keinginan individu untuk berbicara, tetapi juga oleh situasi sosial yang melingkupinya. Relasi keluarga, tekanan budaya, kondisi ekonomi, dan keberadaan dukungan emosional membentuk cara korban mempertimbangkan risiko maupun keamanan sebelum mengungkapkan pengalaman kekerasan kepada orang lain.

### **Ketegangan Informasi dalam Sistem Perlindungan**

Proses pengelolaan informasi setelah pengungkapan kekerasan seksual juga tidak berlangsung secara sederhana, melainkan diwarnai oleh berbagai ketegangan komunikasi dalam keluarga maupun sistem perlindungan anak. Informasi yang awalnya dibagikan secara terbatas sering kali berkembang menjadi konsumsi pihak lain tanpa persetujuan penyintas. Situasi tersebut membuat korban merasa kehilangan kontrol atas informasi pribadi yang sebelumnya hanya ingin disampaikan kepada orang tertentu.

Penyebaran informasi dalam lingkungan keluarga menjadi salah satu bentuk ketegangan yang paling banyak dirasakan penyintas. Informasi yang awalnya disampaikan kepada ibu atau anggota keluarga tertentu kemudian menyebar kepada keluarga besar tanpa persetujuan korban. Kondisi tersebut memunculkan rasa kecewa dan menurunkan tingkat kepercayaan penyintas terhadap lingkungan keluarga yang sebelumnya dianggap aman untuk berbagi pengalaman.

*“Saya hanya bilang ke ibu, minta jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi terus ibu cerita ke nenek, terus nenek cerita ke bibi. Jadi akhirnya semua keluarga tahu. Saya jadi marah dengan ibu, dan saya tidak bisa percaya ibu lagi.” (NY, 21 tahun)*

Ketegangan informasi juga muncul dalam proses penanganan kasus di institusi perlindungan anak. Penyintas sering kali harus mengulang cerita yang sama kepada berbagai pihak seperti polisi, psikolog, petugas kesehatan, maupun pendamping hukum. Pengulangan tersebut menimbulkan kelelahan emosional karena korban merasa harus kembali membuka pengalaman traumatis secara berulang dalam situasi formal yang belum tentu memberikan rasa aman.

Kondisi ruang dan suasana institusi turut memengaruhi kenyamanan komunikasi penyintas selama proses pengungkapan. Sebagian penyintas merasa lebih nyaman berada di ruang konseling dibanding ruang pemeriksaan formal yang ramai dan kaku. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa rasa aman dalam komunikasi tidak hanya dibentuk oleh hubungan interpersonal, tetapi juga oleh lingkungan fisik dan pendekatan komunikasi yang digunakan oleh institusi perlindungan.

*“Pemeriksaan sampai dua kali karena awalnya cerita saya belum lengkap. Saya belum berani bilang semuanya waktu pertama diperiksa.” (RI, 21 tahun)*

Tekanan keluarga setelah proses pelaporan juga memperlihatkan bahwa informasi yang telah terbuka masih terus dinegosiasikan. Dalam beberapa kasus,

anggota keluarga meminta korban untuk mengurangi atau menyembunyikan sebagian cerita ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum demi menjaga nama baik keluarga atau meringankan hukuman pelaku. Hal tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga tetap memengaruhi posisi korban meskipun kasus telah memasuki proses hukum formal.

Pengalaman serupa juga ditemukan dalam proses pendampingan psikologis. Penyintas yang merasa informasi pribadinya tersebar tanpa persetujuan cenderung kembali menutup diri dan membatasi komunikasi dengan orang lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran batas kerahasiaan dapat menghambat proses pemulihan karena korban kehilangan rasa aman untuk melanjutkan pengungkapan pengalaman traumatis.

*“Sering kami temukan anak yang awalnya mulai terbuka, tetapi setelah ceritanya menyebar tanpa izin, mereka langsung menutup diri lagi dan tidak percaya kepada siapa pun.”*  
(Pipit, psikolog pendamping, 40 tahun)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengungkapan kekerasan seksual anak tidak berhenti ketika korban mulai berbicara mengenai pengalaman yang dialaminya. Penyebaran informasi, respons keluarga, dan mekanisme penanganan institusional terus

membentuk cara penyintas mengelola keterbukaan maupun kerahasiaan informasi pribadi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjaga rasa aman, kerahasiaan, dan kepercayaan korban selama proses pendampingan berlangsung.

### **Negosiasi Batas Privasi dalam Keluarga**

Penyampaian informasi mengenai kekerasan seksual pada anak berlangsung melalui proses komunikasi yang bertahap dan penuh pertimbangan. Penyintas cenderung membuka cerita secara parsial sambil mengamati respons lingkungan terdekat sebelum ruang komunikasi. Bentuk komunikasi awal seperti menangis, menolak pergi ke sekolah, atau menyampaikan cerita secara tidak lengkap menunjukkan adanya upaya untuk menguji keamanan relasional sebelum mempercayakan informasi pribadi kepada orang lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bagian dari proses negosiasi batas privasi yang terus berubah sesuai rasa aman dan tingkat kepercayaan dalam hubungan interpersonal (Petronio & Child, 2020).

Kecenderungan untuk menyampaikan cerita secara bertahap memperlihatkan bahwa penyintas mempertimbangkan kemungkinan diterima, dipercaya, atau justru disalahkan ketika mulai

berbicara mengenai peristiwa yang dialami. Keputusan untuk membuka informasi pribadi berkembang melalui proses komunikasi yang dipenuhi pertimbangan emosional dan sosial. Ketidakpastian terhadap kemungkinan respons keluarga maupun lingkungan sosial turut membentuk keraguan korban dalam menentukan kapan dan kepada siapa cerita akan disampaikan (Kienzler et al., 2025). Pola tersebut menunjukkan bahwa keberanian korban untuk berbicara sangat dipengaruhi oleh hadir atau tidaknya rasa aman dalam hubungan interpersonal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penyintas kekerasan seksual cenderung melakukan keterbukaan progresif berdasarkan respons relasional yang mereka terima dari lingkungan sekitar (McGill & McElvaney, 2023). Kebutuhan anak terhadap rasa aman emosional selama proses komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan keterbukaan informasi kepada orang dewasa maupun institusi perlindungan (Ettinger, 2022).

Relasi emosional dalam keluarga menjadi faktor penting yang menentukan terbuka atau tertutupnya batas privasi penyintas. Keamanan relasional dalam keluarga menjadi prasyarat penting bagi penyintas untuk memperluas batas privasi. Respons yang suportif, tidak menghakimi, dan mampu memberikan perlindungan emosional memperluas ruang komunikasi bagi penyintas

untuk melanjutkan proses pelaporan formal. Sebaliknya, respons yang penuh tekanan atau menyalahkan berpotensi memperkuat keputusan korban untuk kembali menyembunyikan informasi pribadi. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa respons pengasuh memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan maupun penghentian komunikasi anak terkait peristiwa traumatis yang dialaminya (Abdul Latiff et al., 2024; van Toledo & Seymour, 2013).

Negosiasi batas privasi juga dipengaruhi oleh posisi anak dalam struktur relasi keluarga. Penyintas tidak sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi akan dibuka karena keputusan tersebut selalu berkaitan dengan respons emosional keluarga, kemungkinan konflik rumah tangga, hingga perubahan relasi interpersonal setelah cerita disampaikan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada anak berlangsung dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama ketika orang dewasa tetap memiliki kontrol dominan terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi pribadi korban. Dominasi perspektif orang dewasa juga membuat partisipasi anak dalam pengambilan keputusan perlindungan sering kali belum sepenuhnya terakomodasi (Toros, 2021). Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai partisipasi anak dalam sistem perlindungan yang

menunjukkan bahwa suara anak sering kali dibatasi oleh dominasi perspektif orang dewasa dalam proses perlindungan sosial (Lätsch et al., 2023).

Rasa aman relasional, kedekatan emosional, dan penerimaan keluarga menjadi faktor yang menentukan bagaimana batas privasi dinegosiasikan oleh penyintas dalam proses komunikasi sehari-hari. Anak secara aktif menentukan kepada siapa cerita akan disampaikan, sejauh mana informasi dibuka, dan kapan keterbukaan dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya membutuhkan akses terhadap mekanisme hukum dan layanan formal, tetapi juga lingkungan komunikasi yang mampu memberikan validasi, menjaga kerahasiaan, dan mengurangi ketakutan korban terhadap kemungkinan penolakan maupun tekanan sosial.

#### **Kuasa, Stigma, dan Budaya Membungkam**

Relasi kuasa dalam keluarga memperlihatkan bahwa penyintas tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap informasi pribadi yang dimilikinya. Ketergantungan emosional dan ekonomi terhadap pelaku membuat korban berada dalam posisi yang rentan untuk mempertahankan kerahasiaan informasi demi menjaga stabilitas keluarga. Situasi tersebut menunjukkan bahwa diam bukan sekadar respons emosional terhadap pengalaman

traumatis, tetapi berkaitan dengan struktur relasi yang menempatkan anak dalam posisi subordinat. Dominasi orang dewasa dalam pengambilan keputusan membuat suara anak sering kali dibatasi, bahkan ketika proses perlindungan telah berlangsung (Lätsch et al., 2023). Respons yang tidak suportif, menyalahkan korban, atau meremehkan cerita penyintas juga dapat memperkuat rasa bersalah dan memperburuk kondisi psikologis korban (Jouriles et al., 2022).

Tekanan budaya dan stigma sosial turut memperkuat praktik membungkam penyintas dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pengungkapan mengenai kekerasan seksual masih sering dipandang sebagai ancaman terhadap kehormatan keluarga sehingga korban memilih membatasi keterbukaan informasi untuk menghindari penghakiman sosial. Hambatan keterbukaan pada anak juga dipengaruhi oleh ketakutan tidak dipercaya serta kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial setelah informasi diketahui lingkungan sekitar (McPherson et al., 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik membungkam korban bekerja melalui rasa malu kolektif, ketakutan terhadap penolakan sosial, serta kekhawatiran akan rusaknya relasi keluarga. Pengelolaan stigma dalam keluarga juga sering dilakukan melalui pembatasan arus informasi dan pengendalian komunikasi untuk menjaga identitas keluarga di hadapan lingkungan sosial (Adu et al.,

2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses penyampaian pengalaman kekerasan kepada pihak profesional sangat dipengaruhi oleh rasa aman komunikasi dan kepercayaan terhadap respons lingkungan sekitar (Manolios et al., 2022). Perdebatan mengenai kewajiban pelaporan juga memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi perlu mempertimbangkan kerentanan komunikasi dan posisi kuasa anak dalam proses pelaporan kasus (Marmor & Devaney, 2025). Budaya diam dalam keluarga tidak hanya bekerja sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi mekanisme yang mempertahankan relasi kuasa dan kontrol terhadap suara anak. Norma budaya mengenai kehormatan keluarga turut membentuk tekanan untuk membatasi penyampaian informasi mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (Mensah et al., 2024).

#### **Ketegangan Batas Informasi dan Kepercayaan**

Perubahan batas kerahasiaan informasi tanpa persetujuan penyintas memperlihatkan bahwa keterbukaan komunikasi dapat memunculkan kerentanan baru bagi korban. Informasi yang awalnya hanya dibagikan kepada orang tertentu sering kali berkembang menjadi pengetahuan bersama dalam keluarga maupun lingkungan

sosial yang lebih luas. Kondisi tersebut membuat penyintas merasa kehilangan kontrol atas cerita yang dimilikinya serta menurunkan rasa aman dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan keberanian untuk berbicara, tetapi juga dengan kemampuan lingkungan sekitar dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban (Canosa et al., 2025; Hietamäki et al., 2024).

Kerentanan komunikasi juga terlihat ketika penyintas harus menyampaikan cerita yang sama kepada berbagai pihak selama proses penanganan kasus berlangsung. Pengulangan informasi kepada aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, maupun pendamping psikologis dapat memunculkan kelelahan emosional dan memperbesar tekanan psikologis korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya menyediakan akses terhadap layanan formal, tetapi juga membutuhkan koordinasi komunikasi antarlembaga yang lebih terintegrasi. Koordinasi yang lemah berisiko menciptakan beban komunikasi tambahan karena penyintas harus terus mempertahankan konsistensi cerita di hadapan berbagai institusi perlindungan (Dixon et al., 2022).

#### **Komunikasi Perlindungan dalam Tata Kelola Perkotaan**

Proses perlindungan anak di wilayah perkotaan memperlihatkan bahwa komunikasi menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Penyintas tidak hanya berhadapan dengan keluarga, tetapi juga dengan berbagai institusi seperti kepolisian, layanan kesehatan, sekolah, lembaga sosial, dan pendamping psikologis. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak berlangsung dalam sistem komunikasi yang melibatkan banyak aktor dengan aturan, prosedur, dan pendekatan yang berbeda. Kompleksitas tersebut membuat kebutuhan terhadap koordinasi komunikasi antarlembaga menjadi semakin penting dalam tata kelola perlindungan anak di kawasan perkotaan (UNICEF, 2021).

Kondisi ruang dan pendekatan komunikasi institusi turut memengaruhi keberanian penyintas dalam menyampaikan informasi pribadi. Lingkungan yang terlalu formal, ramai, dan penuh tekanan berpotensi memperbesar rasa takut maupun kecemasan korban selama proses penanganan berlangsung. Sebaliknya, ruang komunikasi yang lebih aman, suportif, dan sensitif terhadap trauma dapat membantu korban mempertahankan keberanian untuk berbicara mengenai peristiwa yang dialaminya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap trauma memiliki peran

penting dalam menjaga keberlanjutan keterbukaan informasi pada anak selama proses perlindungan berlangsung (Augusti & Myhre, 2024; Canosa et al., 2025).

Koordinasi perlindungan yang melibatkan banyak institusi juga dapat memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan informasi pribadi korban. Penyintas sering kali harus menyampaikan cerita yang sama kepada berbagai pihak karena lemahnya integrasi komunikasi antarlembaga. Situasi tersebut tidak hanya memperbesar kelelahan emosional korban, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih cenderung menempatkan beban komunikasi pada penyintas. Penelitian mengenai perlindungan anak menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga yang tidak terintegrasi dapat menghambat proses safeguarding dan memperbesar risiko terjadinya pengulangan trauma dalam proses penanganan kasus (Dixon et al., 2022; Finch et al., 2021).

Peran institusi pendidikan dan layanan sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi perlindungan bagi anak. Sekolah dan lembaga sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan, tetapi juga sebagai ruang awal yang memungkinkan anak memperoleh informasi mengenai perlindungan diri dan keberanian untuk berbicara. Program edukasi berbasis sekolah diketahui dapat meningkatkan

pemahaman anak mengenai kekerasan seksual serta memperbesar kemungkinan anak mencari bantuan ketika menghadapi situasi berisiko (Walsh et al., 2015). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi perlindungan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga berkaitan dengan upaya pencegahan dan penguatan literasi perlindungan anak di lingkungan sosial perkotaan.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual anak tidak dapat dipahami sebagai tindakan komunikasi yang sederhana maupun individual. Proses keterbukaan informasi berlangsung melalui negosiasi batas privasi, dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam keluarga, tekanan budaya, serta kompleksitas sistem perlindungan di wilayah perkotaan. Penyintas tidak hanya menghadapi ketakutan pribadi ketika mulai berbicara mengenai pengalaman traumatis, tetapi juga berhadapan dengan risiko stigma sosial, kebocoran informasi, dan prosedur institusional yang belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan korban. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan komunikasi perlindungan yang mampu menjaga kerahasiaan informasi, membangun rasa aman relasional, dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam sistem perlindungan anak.

## SIMPULAN

Kekerasan seksual anak dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa proses penyampaian informasi tidak berlangsung secara sederhana maupun spontan. Penyintas cenderung membangun keterbukaan secara bertahap dengan mempertimbangkan rasa aman, kedekatan emosional, serta kemungkinan respons dari lingkungan terdekatnya. Relasi keluarga menjadi ruang yang menentukan apakah anak merasa cukup aman untuk berbicara atau justru memilih mempertahankan kerahasiaan informasi. Dalam kondisi tersebut, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian cerita, tetapi juga menjadi ruang negosiasi antara perlindungan, ketakutan, dan relasi kuasa dalam keluarga.

Tekanan budaya, stigma sosial, serta lemahnya pengelolaan kerahasiaan informasi turut membentuk kerentanan komunikasi pada penyintas. Ketika informasi pribadi menyebar tanpa persetujuan atau respons lingkungan cenderung menyalahkan korban, kepercayaan terhadap keluarga maupun institusi perlindungan menjadi semakin melemah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup bergantung pada prosedur hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap trauma, mampu menjaga kerahasiaan informasi, dan memberikan ruang aman bagi anak untuk

berbicara tanpa rasa takut maupun tekanan sosial.

Kajian ini memperluas penerapan Teori Manajemen Privasi Komunikasi dalam konteks perlindungan anak di lingkungan keluarga perkotaan Indonesia yang masih dipengaruhi relasi hierarkis dan budaya kolektivitas. Negosiasi batas privasi yang dilakukan penyintas menunjukkan bahwa keterbukaan informasi selalu berkaitan dengan pertimbangan sosial, emosional, dan struktural yang lebih luas. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan komunikasi perlindungan dalam tata kelola perkotaan melalui koordinasi antarlembaga, pendampingan yang sensitif terhadap trauma, serta penciptaan lingkungan komunikasi yang mampu melindungi suara dan kerahasiaan informasi anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latiff, M., Fang, L., Goh, D. A., & Tan, L. J. (2024). A systematic review of factors associated with disclosure of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, *147*, 106564. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564>
- Adu, J., Oudshoorn, A., Anderson, K., Marshall, C. A., & Stuart, H. (2024). Negotiating familial mental illness stigma: The role of family members of persons living with mental illnesses. *PLOS ONE*, *19*(9), e0311170. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311170>
- Alaggia, R., Collin-Vezina, D., & Lateef, R. (2019). Facilitators and barriers to child sexual abuse disclosure: A research update (2000–2016). *Trauma, Violence, & Abuse*, *20*(2), 260–283. <https://doi.org/10.1177/1524838017697312>
- Anthony, E. R., Hipp, T. N., Darnell, D. A., Armistead, L., Cook, S. L., & Skinner, D. (2014). Caregiver–youth communication about sex in South Africa: The role of maternal child sexual abuse history. *Journal of Child Sexual Abuse*, *23*(6), 657–673. <https://doi.org/10.1080/10538712.2014.932877>
- Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2024). The barriers and facilitators to abuse disclosure and psychosocial support needs in children and adolescents around the time of disclosure. *Child Care in Practice*, *30*(2), 187–202. <https://doi.org/10.1080/13575279.2021.1902279>
- Canosa, A., McPherson, L., Gatwiri, K., Rotumah, D., Modderman, C., & Chubb, J. (2025). Practices and responses that help or hinder disclosures of child sexual abuse:

- Perspectives from victim survivors and practitioners. *Child Abuse & Neglect*, 169(Part 1), 107633. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107633>
- Coyne, I. (2010). Research with children and young people: The issue of parental (proxy) consent. *Children & Society*, 24, 227–237. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2009.00216.x>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- DiLillo, D., Tremblay, G. C., & Peterson, L. (2000). Linking childhood sexual abuse and abusive parenting: The mediating role of maternal anger. *Child Abuse & Neglect*, 24(6), 767–779. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00138-1](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00138-1)
- Dixon, S., Kendall, B., Driscoll, J., & Pope, C. (2022). Supporting the ‘multi’ in multi-agency working: Learning with and from each other could enable multi-agency safeguarding. *British Journal of General Practice*, 72(722), 438–439. <https://doi.org/10.3399/bjgp22X720617>
- Erickson, M. F., Egeland, B., & Pianta, R. (1989). The effects of maltreatment on the development of young children. In *Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect* (pp. 647–684). Cambridge University Press.
- Ettinger, T. R. (2022). Children’s needs during disclosures of abuse. *SN Social Sciences*, 2(7), 101. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00397-6>
- Finch, M., Featherston, R., Chakraborty, S., Bjørndal, L., Mildon, R., Albers, B., Fiennes, C., Taylor, D. J. A., Schachtman, R., Yang, T., & Shlonsky, A. (2021). Interventions that address institutional child maltreatment: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 17(1), e1139. <https://doi.org/10.1002/cl2.1139>
- Hernandez, R., & Petronio, S. (2019). Communication privacy management theory. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.373>
- Hietamäki, J., Husso, M., Arponen, T., & Lahtinen, H. (2024). Differences between girls and boys in the disclosure of sexual violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 39, 2629–2654.

- <https://doi.org/10.1177/08862605231221283>
- Humaira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., & Novitasari, K. (2015). Sexual violence against children: A review of perpetrator–victim relations and child vulnerabilities. *Psikoislamika*, 12(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>
- Jouriles, E. N., Sitton, M. J., Adams, A., Jackson, M., & McDonald, R. (2022). Non-supportive responses to adolescents who have experienced sexual abuse: Relations with self-blame and trauma symptoms. *Child Abuse & Neglect*, 134, 105885. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105885>
- Kienzler, H., Massazza, A., Kuykendall, R., Tamimi, N., Hammoudeh, W., & Giacaman, R. (2025). Uncertainty and mental health: A qualitative scoping review. *SSM - Qualitative Research in Health*, 7, 100521. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100521>
- Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2006). Family communication patterns theory: A social cognitive approach. In *Engaging theories in family communication: Multiple perspectives* (pp. 50–65). SAGE.
- <https://doi.org/10.4135/9781452204420.n4>
- Komnas Perempuan. (2021). *Women under pandemic pressures: Surges in sexual violence, cyber violence, child marriage, and limited response capacity amid COVID-19*. <https://komnasperempuan.go.id/catahan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Lätsch, D., Quehenberger, J., Portmann, R., & Jud, A. (2023). Children’s participation in the child protection system: Are young people from poor families less likely to be heard? *Children and Youth Services Review*, 145, 106762. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106762>
- Manolios, E., Braoudé, I., Jean, E., Huppert, T., Verneuil, L., Revah-Levy, A., & Sibeoni, J. (2022). Disclosing child sexual abuse to a health professional: A metasynthesis. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 788123. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.788123>
- Marmor, A., & Devaney, J. (2025). Mandatory reporting of child sexual abuse in the UK—Are we all talking about the same

- thing? *The British Journal of Social Work*, *bcaf208*.  
<https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaf208>
- Mathews, B., Pacella, R., Dunne, M. P., Simunovic, M., & Marston, C. (2020). Improving measurement of child abuse and neglect: A systematic review and analysis of national prevalence studies. *PLOS ONE*, *15*(1), e0227884.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227884>
- McGill, L., & McElvaney, R. (2023). Adult and adolescent disclosures of child sexual abuse: A comparative analysis. *Journal of Interpersonal Violence*, *38*(1–2), NP1163–NP1186.  
<https://doi.org/10.1177/08862605221088278>
- McPherson, L., Gatwiri, K., & Graham, A. (2025). What helps children and young people to disclose their experience of sexual abuse and what gets in the way? A systematic scoping review. *Child & Youth Care Forum*, *54*, 515–544.  
<https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>
- Mensah, F., Abdullah, A., & Cudjoe, E. (2024). Unpacking norms shaping disclosure of intrafamilial child sexual abuse. *Discover Psychology*, *4*, 170.  
<https://doi.org/10.1007/s44202-024-00286-4>
- Petronio, S., & Child, J. T. (2020). Conceptualization and operationalization: Utility of communication privacy management theory. *Current Opinion in Psychology*, *31*, 76–82.  
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.08.009>
- Purnama, M., Lorence, V., & Tarigan, Y. (2023). Verbal sexual abuse pada kolom komentar akun media sosial TikTok @kinderflix.idn. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *7*, 246–261.  
<https://doi.org/10.35760/mkm.2023.v7i2.10135>
- Rudolph, J., Zimmer-Gembeck, M. J., Shanley, D. C., Walsh, K., & Hawkins, R. (2018). Parental discussion of child sexual abuse: Is it associated with parenting practices of involvement, monitoring, and general communication? *Journal of Child Sexual Abuse*, *27*(2), 195–216.  
<https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425946>
- Toros, K. (2021). Children’s participation in decision making from child welfare workers’ perspectives: A systematic review. *Research on Social Work Practice*, *31*(4), 367–374.  
<https://doi.org/10.1177/1049731520984844>

- UNICEF. (2021). *Strengthening child protection systems to respond to violence against children*. <https://www.unicef.org/documents/child-protection-systems-strengthening>
- van Toledo, A., & Seymour, F. (2013). Interventions for caregivers of children who disclose sexual abuse: A review. *Clinical Psychology Review*, 33(6), 772–781.
- Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(4), CD004380. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3>
- <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.05.006>